



LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1.a. Judul Penelitian : **Sebuah Pengamatan, Mencari Alternatif Pengembangan Prog. Sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan setelah**  
 b. Macam Penelitian : (1) Deskriptif (1) Kasus berintegrasi dg FISIP I  
 (2) Kualitatif (2) Lainnya  
 (3) Kualitatif  
 c. Kategori Penelitian : IV

2. Peneliti:  
 a. Nama Lengkap : Ir. SRI YUNIATI PUTRI KOES HARDINI  
 b. NIP : 131 866 182  
 c. Jenis Kelamin : Perempuan  
 d. Pangkat/golongan : Penata Muda/III.a.  
 e. Jabatan Akademik : Asisten Ahli Madya  
 f. Unit Kerja : FISIP UT  
 g. Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik UT

3. Pembimbing : Drs. Alex Rumondor

4. Lokasi Penelitian : FISIP - UT

5. Jangka Waktu Penelitian : Agustus - Oktober 1992

6. Biaya yang diperlukan : Rp. 350.000,-

... Jakarta... 30-10-1992

Menyetujui:  
 Pembimbing,  
  
 Drs. Alex Rumondor  
 NIP. 130 117 532

Peneliti,  
  
 Ir. Sri Yuniati Putri K.H.  
 NIP. 131 866 182

KEPALA FUSLITABNAS-UI  
  
 ARIA DJALIL  
 NIP. 130364776

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT  
  
 Drs. Waskito Piptosasmito, MA.  
 NIP. 130 189 426



## ABSTRAK

Mengamati perkembangan suatu program baru yang ditawarkan ke pasaran, akan dapat terlihat kendala-kendala apa yang dihadapi.

Selama kurang lebih 3(tiga) tahun, ternyata program sertifikat Wirausaha Mandiri Terarah paket A, yang kemudian namanya berubah menjadi program Sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan karena berintegrasi ke FISIP UT, mengalami perkembangan yang ternyata kurang memuaskan bila dilihat dari jumlah peserta yang mengikutinya.

Jumlah mahasiswa yang ikut program ini adalah sebagai berikut:

Angkatan	Jumlah Peserta	Yang Lulus
I	88	38
II	66	24
III	26	12
IV dan V	+ 80	-

Kurangnya peminat yang mengikuti program sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain masalah yang berhubungan dengan manajemen, baik yang menyangkut kerja sama antar instansi maupun manajemen pengelolaannya.

Untuk menanggulangi masalah ini perlu diadakan perbaikan. Alternatif perbaikan yang mungkin dapat dilaksanakan adalah yang berhubungan dengan perbaikan kerjasama antar instansi, perbaikan cara kerja masing-masing unit terkait dan tidak menghilangkan kemungkinan untuk menghapus program ini secara perlahan-lahan, apabila alternatif pertama tidak dapat dilaksanakan.

**SEBUAH PENGAMATAN  
MENCARI ALTERNATIF PENGEMBANGAN  
PROGRAM SERTIFIKAT KEWIRAUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN  
SETELAH BERINTEGRASI DENGAN FISIP-UT**

Oleh:

**Ir. SRI YUNIATI PUTRI KOES HARDINI  
NIP: 131 866 182**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**1992**

**SEBUAH PENGAMATAN, Mencari Alternatif Pengembangan  
PROGRAM SERTIFIKAT Kewirausahaan Setelah Berintegrasi Dengan  
FISIP - UT**

**PENDAHULUAN**

Dengan diintegrasikannya program sertifikat Kewirausahaan ke dalam FISIP - UT, berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam mengelola dan mengembangkan program ini seluruhnya disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di Universitas Terbuka.

Bila dilihat perkembangan sejak dibukanya program sertifikat Wirausaha Mandiri Terarah yang kemudian berintegrasi dengan FISIP dan berubah namanya menjadi Program Sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, ternyata meskipun pada setiap semester ada pesertanya, namun jumlahnya sangatlah tidak layak untuk disebut sebagai suatu program pendidikan yang diminati oleh masyarakat.

Meskipun promosi sudah dilaksanakan, bahkan melalui kunjungan ke SLTA yang ada di Jakarta dan sekitarnya, akan tetapi masih banyak kendala yang memang harus dihadapi untuk benar-benar menjadi program yang tidak hanya namanya saja yang mandiri tetapi dalam pelaksanaannya juga harus belajar mandiri.

Latar belakang timbulnya program sertifikat ini adalah adanya

peluang untuk menjangkau lulusan SLTA yang merupakan langkah penting bagi peningkatan jumlah mahasiswa UT. Sifat pendidikan program sertifikat ini pada dasarnya adalah pendidikan dan latihan yang dapat memberi tiga kemampuan untuk mewujudkan kompetisi Wirausaha yang saling berkaitan, yaitu

1. Mengembangkan sikap dan motivasi kerja.
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
3. Mengembangkan sikap dan kemampuan wirausaha.

Berdasarkan Keppres No.34 tahun 1972 dan Inpres No.15 tahun 1974 DEPNAKER bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja untuk bukan pegawai negeri. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu sistem yang disebut Sistem Latihan Kerja Nasional atau SISLATKERNAS.

Dalam rangka penjabaran operasional Inpres No.15 tahun 1974 Menteri Dikbud selaku Ketua Tim koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan telah menetapkan pelaksanaan pembinaan dan latihan.

Pada awalnya program sertifikat ini dikelola oleh Yayasan LAPPIN (Lembaga Profesi, Industri dan Niaga) hasil kerjasama antara UT, DEPNAKER RI dan KADIN Indonesia dengan nama program Sertifikat Wirausaha Mandiri Terarah paket A (direncanakan akan ada paket B). Setelah Yayasan LAPPIN di bubarkan dan program ini berintegrasi dengan FISIP UT, sementara kerja sama dengan DEPNAKER dan KADIN belum dihapuskan, nama program inipun berganti

menjadi program Sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan.

Program Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat merupakan rintisan upaya untuk merobah pola pikir para angkatan kerja terutama lulusan SLTA, yang umumnya masih menggantungkan pekerjaan pada sektor formal (menjadi pegawai), menjadi pola pikir yang mandiri dan meningkatkan kewirausahaan.

Kenyataannya pelaksanaan dari program sertifikat ini ternyata banyak dijumpai kendala-kendala yang seringkali sulit untuk dihindari.

Kendala itu tidak hanya melibatkan bagian dalam program itu sendiri saja akan tetapi juga pihak luar yang menyangkut kerja sama antar instansi dalam hal ini adalah Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia (DEPNAKER RI) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN Indonesia).

Tidak konsistennya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dibuat bersama, akhirnya justru lebih sering merugikan mahasiswa. Hal ini tentunya bukan hal yang harus dipertahankan bila program sertifikat Kewirausahaan ingin tetap bertahan, bahkan bila mungkin meningkatkan citranya untuk menjadi program yang diminati masyarakat.

Bila dilihat dari kebutuhan akan pendidikan yang tidak hanya meningkatkan mutu manusianya akan tetapi juga meningkatkan potensi yang dapat digali dari manusia itu sendiri maka tentunya Kewirausahaan adalah sebuah alternatif yang paling diharapkan untuk dapat menciptakan manusia berpendidikan yang tidak memburu

peluang kerja yang ditawarkan perusahaan, akan tetapi merupakan manusia pencipta kerja.

Jadi pada dasarnya program sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan ini mestinya dapat dipasarkan dengan baik apabila dilakukan perbaikan dari segi manajemen, baik itu yang bersifat akademik maupun yang bersifat administratif.

Perbaikan yang dilakukan tentunya disesuaikan dengan kondisi pasar kerja yang ada pada saat ini dan yang akan datang, sehingga apa yang dikehendaki oleh peserta dalam memperoleh keahlian untuk bekal kemandiriannya dapat segera digunakan dan bermanfaat bagi kehidupannya kelak.

#### TUJUAN

Studi pengamatan ini mempunyai tujuan:

1. Memberi masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan Program Sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan agar menjadi program yang diminati dan pada saat yang bersamaan mencari alternatif cara pengelolaan yang lebih baik.
2. Mencari alternatif model yang cocok agar Program Sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dapat dikembangkan di Universitas Terbuka, yang menggunakan sistem belajar jarak jauh.
3. Memberi masukan yang dapat digunakan untuk mengembangkan modul-modul yang sudah ada, untuk ditinjau kembali atau bahkan dikembangkan menjadi modul khusus yang berupa matakuliah

tersendiri, dimana isinya dapat merupakan rangkuman dari matakuliah yang dapat memotivasi mahasiswa, sehingga terbukalah pandangan mahasiswa untuk tidak mencari kerja tetapi justru berpikir untuk siap terjun ke masyarakat dengan menciptakan peluang kerja.

Modul ini dapat dimasukkan sebagai matakuliah pilihan pada semua program studi, yang tentunya dengan pertimbangan tidak melanggar ketentuan dari DIKTI.

#### MANFAAT

Dengan adanya masukan yang jauh dari sempurna dari studi pengamatan ini, dapatlah diharapkan agar program studi Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan ini dapat dipertimbangkan lagi keberadaannya.

Bila ditiadakan tentunya tidak menutup kemungkinan dibuat buku mata kuliah khusus mengenai Kewirausahaan dan dapat ditawarkan sebagai matakuliah pilihan kepada mahasiswa, yang gunanya adalah meningkatkan kemandirian mahasiswa sehingga tidak menciptakan mahasiswa yang setelah lulus menjadi pencari kerja, tetapi merupakan pencipta kerja.

Juga tidak menutup kemungkinan ke dua-duanya berjalan bersama yaitu program wirausaha tetap dipertahankan sebagai program sertifikat yang ditawarkan dan tentunya dengan perbaikan, serta terciptanya mata kuliah Kewirausahaan sebagai mata kuliah pilihan bagi mahasiswa yang mengambil program S1.



Bahkan mungkin meniadakan dengan secara perlahan-lahan apabila memang diperhitungkan sudah tidak layak lagi untuk dipasarkan.

## TINJAUAN PUSTAKA

Kewiraswastaan atau kewirausahaan dapat diartikan sebagai seni, siasat dan silat dalam usaha kerja dalam arti seni, silat dan siasat menghadapi dan melawan resiko.

Dalam buku Encyclopedia of Entrepreneurship yang ditulis oleh Calvin. A Kent, Donald L. Sexton dan Karl H. Vesper mengatakan

- a. Seseorang yang selalu memikirkan resiko dari modal yang diusahakannya bukanlah seorang wirausahawan akan tetapi seorang investor, sedangkan orang yang memikirkan resiko tentang reputasi atau porsinya dalam suatu perusahaan yang besar - sebagai hasil dari suatu pembaharuan yang diidentifikasi secara benar- maka dia memiliki beberapa prekondisi sebagai seorang wirausahawan.
- b. Seorang wirausaha tidak terinovasi oleh ide yang kreatif akan tetapi oleh kesadaran akan nilai dari ide kreatif tersebut dan dengan mengembangkannya.

Sedangkan menurut Bp. Mohammad Said dan Dr. Haryati Soebadio, Kewiraswastaan atau Kewirausahaan bukanlah sekedar istilah terjemahan dari entrepreneurship saja. Wiraswasta adalah suatu pengertian yang terdiri dari dua suku kata yaitu wira dan swasta yang berarti manusia teladan dalam berdikari tidak saja dalam

sektor partikelir (karena swasta berarti atas kemampuan sendiri).

Apakah kewirausahaan dalam diri seseorang dapat dibentuk atau sudah merupakan bakat sejak dilahirkan? Jawabannya adalah kewirausahaan dapat dibentuk dalam diri seseorang dengan mempelajari Kewirausahaan itu sendiri. Menurut Dr. Payaman J. Simanjuntak (1992), strategi pengembangan kewirausahaan didasarkan pada beberapa kenyataan dan kondisi masyarakat antara lain

- a. Tidak semua orang otomatis mampu berwirausaha dalam arti dapat membuka bisnis dengan berhasil, walaupun ada peluang dan tersedia fasilitas.
- b. Kemampuan berusaha atau berwirausaha bukan bawaan lahir, bukan milik atau monopoli satu kelompok keturunan atau kelompok suku.
- c. Kewirausahaan adalah kemampuan yang dapat dikembangkan baik melalui pendidikan maupun melalui latihan kerja. Kemampuan perlu didukung oleh seni berusaha yang dapat dikembangkan melalui praktek dan pengalaman. Dengan kata lain semua suku di Indonesia dapat menjadi wirausaha yang sukses, bila dipersiapkan dan mempersiapkan diri dan bila diciptakan kesempatan dan iklim untuk berwirausaha.

Menurut Matthias Aroef (1991) dalam makalahnya yang berjudul *"Perkuatan Paduan Dunia Pendidikan, Usaha dan Pemerintah Untuk Penumbuhan Kewirausahaan di Indonesia"*, seorang wirausahawan dapat melihat kesempatan berusaha, menghimpun sumber daya yang

diperlukan untuk mewujudkan kesempatan berusaha itu dan menunjuk orang yang akan menjalankan perusahaan yang terbentuk.

Oleh karena itu dalam suatu negara terutama negara-negara yang sedang berkembang apabila tidak ada para wirausahawan, maka tidak ada orang yang dapat mengidentifikasi kesempatan berusaha yang ada dan tidak ada orang yang berani memunculkan perusahaan baru yang dapat memberi kesempatan kerja baru, produk-produk baru dan lain-lainnya.

Dengan adanya pelajaran mengenai Kewirausahaan, maka jumlah wirausahawan dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat membantu roda pembangunan yang sedang dijalankan oleh negara, terutama sekali adalah dalam mengurangi jumlah pengangguran yang setiap tahun selalu bertambah.

Menjadi seorang wirausaha mempunyai ciri pribadi yang unik, memiliki kemampuan untuk menemukan serta mengevaluasi peluang-peluang yang ada, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan juga bertindak untuk mendapatkan keuntungan dari peluang-peluang tersebut.

Pribadi yang berorientasi pada tindakan dan bermotivasi tinggi dalam mengambil resiko untuk mencapai tujuan inilah yang perlu dikembangkan dan dibina.

Memang mustahil untuk mendapatkan sifat mandiri yang ideal, akan tetapi dengan adanya pendidikan kewirausahaan tidak menutup kemungkinan akan muncul manusia dengan sifat dominan yang mendekati model pribadi seorang wirausaha, yaitu yang mempunyai

orientasi ke masa depan dan berani menanggung resiko dalam mencapai usahanya. Sebenarnya inti dari wirausaha adalah kesediaan untuk bertanggung jawab akan apa yang dilakukannya dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Dalam kewirausahaan orang harus memahami betul-betul siapa dirinya sehingga dapat mengembangkan potensi diri yang ada secara bertanggung jawab. Bila inti ini sudah dapat dilakukan maka akan lebih mudah bila akan menyusun suatu program yang tujuannya adalah meningkatkan pendidikan kewirausahaan.

Tetapi dalam merencanakan suatu program pendidikan dan latihan yang baru kita harus ingat bahwa kesulitan akan selalu ada. Menurut K.R. Mc Kinnon, beberapa kesulitan yang mungkin timbul dari program yang direncanakan biasanya berhubungan dengan

1. Organisasi dan penempatan.

Semua pelaksana program harus mengerti tentang hubungan antara pola organisasi dengan tujuan sistem pendidikan dan diperlukan waktu untuk menyelesaikan studi jangka panjang.

2. Sikap masyarakat terhadap sistem pendidikan.

Berhasil tidaknya jenis lembaga pendidikan yang baru terutama disebabkan oleh reaksi masyarakat.

3. Penggabungan beberapa kebutuhan.

Perencana harus pandai-pandai membuat rencana yang dapat dibenarkan dan membuat pilihan seandainya rencana itu ditentang oleh para pendidik.

4. Kurangnya pengetahuan masalah kependidikan.

Perencana yang bijaksana tidak tergodanya oleh hal-hal yang tampak lebih meyakinkan daripada kenyataan yang ada, tanpa didukung oleh data.

Sedangkan G. C. Ruscoe (1982) menyarankan beberapa kondisi yang dapat diperbaiki antara lain

- a. Memperkuat kembali dasar yang sama antara perencanaan pendidikan dan perencanaan umum dengan bantuan dari luar.
- b. Menggunakan teknik perencanaan pendidikan yang ada dan baik dengan memperbaiki status dari perencanaan pendidikan.
- c. Menggabungkan diri dengan mereka yang sibuk mempelajari dan mengubah administrasi umum dengan meningkatkan kesadaran para perencana pendidikan akan kekuatan dan kelemahan administrasi yang ada dan yang mempengaruhi rencana pelaksanaan.

Perkembangan kewirausahaan di suatu negara banyak dipengaruhi oleh keadaan dalam negara itu sendiri.

Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat berpengaruh erat dengan meningkatnya kebutuhan akan manusia yang mempunyai jiwa wirausaha. Hal ini dapat dilihat dari perubahan pola kehidupan manusia dalam bekerja.

Bila pada masa yang lalu memperoleh pekerjaan adalah hal yang mudah karena persaingan tidak begitu ketat, maka untuk masa sekarang dimana peningkatan jumlah penduduk begitu pesat dirasakan, persaingan untuk memperoleh pekerjaan dengan persyaratannya yang berat juga semakin meningkat.

Bila keadaan seperti ini berjalan terus-menerus, tentunya akan meningkatkan jumlah pengangguran, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan penduduk Indonesia sampai saat ini masih terhitung rendah. Dengan bekal pendidikan tinggipun sekarang sudah mulai sulit untuk mendapatkan kerja.

Menurut Payaman Simanjuntak (1988) Bursa tenaga kerja di Indonesia memperlihatkan besarnya pencari kerja lulusan SLTA, sarjana muda dan jurusan-jurusan tertentu. Di satu pihak tingkat pendidikan di Indonesia rendah, akan tetapi di lain pihak kita saksikan bahwa sebagian tenaga terdidik sukar memperoleh pekerjaan yang sesuai.

Tabel 1.

Pencari kerja yang belum ditempatkan diperinci menurut Tingkat Pendidikan pada akhir Triwulan II tahun 1989.

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE
1	SD ke bawah	171.725	16,13
2.	SLTP	229.482	21,56
3.	SLTA	621.045	58,34
4.	Sarjana Muda	23.774	2,23
5.	Sarjana lengkap	18.458	1,73
	Jumlah	1.065.484	100,00

Sumber : Berita Pasar Kerja

Departemen Tenaga Kerja RI. Triwulan II Tahun 1989

Pertumbuhan penduduk hingga tahun 2000 tampaknya masih tetap tinggi terutama di pulau Jawa, sehingga tekanan penduduk masih

merupakan masalah nasional.

Tekanan penduduk di luar P. Jawa juga akan dirasakan, karena penambahan anggota di setiap keluarga tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang lebih produktif dan remuneratif.

Masalah lain timbul karena baik perguruan tinggi negeri maupun swasta belum mampu mencocokkan penerimaan mahasiswa dan jumlah lulusan yang cocok dengan pasaran kerja. Lulusan jurusan sosial non eksakta nampaknya akan terus bertambah sementara kesempatan kerja untuk mereka masih terbatas. Dengan demikian ketimpangan pasar kerja masih berjalan terus, yaitu terdapat kekurangan tenaga terdidik dan terampil berdampingan dengan pengangguran terdidik.

Terjadinya pengangguran terbuka di daerah perkotaan karena pada umumnya mereka yang berpendidikan mencari kerja yang sifatnya formal, padahal kesempatan yang tersedia jumlahnya sangat terbatas. Sebagian dari mereka mencoba untuk berwiraswasta (pada status non formal), tetapi karena kurangnya kemampuan berwiraswasta dan pengalaman serta dukungan modal, akhirnya gagal (Sinuraya.O. : 1989).

Alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah menumbuhkan sifat wirausaha, hal ini dapat digunakan untuk mengantisipasi mereka yang sulit untuk mendapat pekerjaan. Bagi yang memiliki pendidikan yang cukup diharapkan tidak lagi merupakan pencari kerja akan tetapi merupakan pencipta kerja.

Dalam dunia pendidikan perlu dikembangkan sikap dan kemampuan profesionalisme. Seorang lulusan lembaga pendidikan harus mampu untuk tidak tergantung pada pekerjaan yang diberikan oleh orang lain. Untuk itu perlu dikembangkan, bukan saja pengetahuan teknis dan kewirausahaan akan tetapi juga sikap, inisiatif dan kepercayaan atas kemampuan sendiri (Simanjuntak.P; 1988).

Dari sinilah fungsi pendidikan yang merupakan daya upaya untuk menolong manusia memperoleh kesejahteraan hidup terlihat maknanya.

Peran pendidikan formal terhadap wirausaha dapat dilihat dari pendapat Wasty Soemanto (1980) yaitu dalam kenyataannya jarang sekali tamatan pendidikan formal yang berusaha mengamalkan dan mengembangkan pengalaman pendidikan formal mereka untuk pengabdian umat manusia melalui kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Dari sini akan timbul pertanyaan apakah hanya sampai sedemikian tingkat kepedulian pendidikan formal terhadap perkembangan kewirausahaan dalam mengemban tugas mendidik putra-putri bangsa?. Sebenarnya kualitas para tamatan pendidikan formal yang kurang mampu dan kurang mau menjadi manusia yang berwirausaha tidak sepenuhnya merupakan kesalahan yang dapat dilimpahkan pada sistem pendidikan formal yang ada sekarang ini.

Menurut Wasty Sumanto (1982), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh manusia,



antara lain

1. Berubahnya pola-pola kehidupan manusia.
2. Berubahnya dunia pekerjaan manusia akibat laju pertumbuhan yang tinggi.
3. Tantangan dalam pertumbuhan ekonomi.
4. Menipisnya sumber-sumber ekonomi masyarakat pedesaan.
5. Kemampuan pendidikan luar sekolah dalam menghasilkan manusia pencipta lapangan kerja.
6. Kemampuan pendidikan keluarga dalam mempersiapkan manusia pekerja.
7. Pribadi manusia itu sendiri.

Bagaimanapun kenyataan pendidikan yang ada sekarang, manusia wirausaha tetap perlu untuk diwujudkan.

#### PEMBAHASAN

Dengan adanya kebutuhan akan manusia-manusia berpendidikan yang dapat diharapkan untuk dapat menciptakan kerja, maka program sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan masih sangat diperlukan. Untuk memperoleh pasaran di masyarakat luas yang sedang membangun, tentunya program sertifikat Kewirausahaan ini perlu diadakan perbaikan-perbaikan yang menyeluruh.

Berdasarkan pengalaman pahit di masa yang lampau, dimana program sertifikat Wirausaha Mandiri yang ditawarkan pertama kali ternyata gagal menembus pasaran untuk menjadi program yang

diminati, maka ada beberapa alternatif yang dapat diberikan untuk tidak membuang program sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan begitu saja.

Alternatif-alternatif tersebut adalah:

1. Meneruskan program sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang sudah ada dengan perbaikan yang meliputi:

1.1. Kerja sama antar instansi.

Selama ini yang menyelenggarakan pelatihan dimana hasil akhir yang dievaluasi berupa proposal usaha, adalah Kanwil Depnaker. Akan tetapi dengan tidak aktifnya Kanwil Depnaker di beberapa wilayah di mana mahasiswa berada, menjadikan mahasiswa sangat dirugikan. Apalagi pelatihan ini diharapkan dapat menambah wawasan praktek mahasiswa dalam berwirausaha. Hal ini sesuai dengan metode SISLAKERNAS (Sistem Latihan Kerja Nasional) yang berdasarkan pada 'training by doing' yaitu dengan memberi lebih banyak praktek daripada teori. Sedangkan dari Universitas Terbuka sendiri ternyata belum siap untuk menanggulangi kesulitan ini. Akhirnya diputuskan bahwa bagi mahasiswa yang tidak mengikuti pelatihan ini mempunyai tingkat keahlian sebagai Wirausahawan Muda, yang dapat dilihat pada sertifikat yang diperolehnya bila ia lulus.

Setelah lulusan dihasilkan ternyata gelar yang diperoleh juga membingungkan bagi mahasiswa itu sendiri, sebab

ternyata untuk berusaha sendiripun sertifikat itu tidak mempunyai nilai yang pasti, apalagi bila dikaitkan dengan permagangan yang diadakan oleh perusahaan besar yang mungkin dapat menerima mereka, ternyata sertifikat itu tidak banyak membantu, dengan kata lain sertifikat yang dihasilkan belum mempunyai keterkaitan dengan instansi lain dalam mendirikan usaha yang diharapkan dapat memandirikan mahasiswa peserta program ini.

Dan program yang semestinya menghasilkan produk akhir yang sama yaitu mahasiswa yang sudah mengenal bagaimana berwirausaha akhirnya tidak tercapai, padahal menurut Calvin A. Kent; Donald L Sexton dan Karl H. Vesper, setelah mengikuti training kewirausahaan, para peserta dapat diharapkan mempunyai ciri sebagai berikut:

- a. Untuk sebagian besar peserta diharapkan siap untuk menerjuni bidang bisnis yang akan dikembangkan.
- b. Hasil training dapat diharapkan menjadikan mahasiswa lebih efektif, lebih bekerja keras, lebih bertanggung jawab dan lebih berbobot dalam praktek bisnis.

Untuk mencapai hal yang ideal memang tidak mungkin, tetapi menuju ke arah yang diharapkan adalah jalan yang bijaksana.

Sebagai alternatif jalan keluar untuk menggantikan fungsi Depnaker, antara lain adalah

- a. Bila praktek membuat proposal masih diteruskan maka

perlu dilatih tenaga dari UT (terutama yang di UPBJJ) agar dapat menggantikan fungsi Pemandu Usaha yang berasal dari DEPNAKER dalam hal ini yang berada di Kanwil-Kanwilnya.

Dengan digunakannya Pemandu Usaha dari UT mempersingkat jalur penilaian sehingga pelayanan terhadap mahasiswa dapat lebih ditingkatkan.

- b. Dalam melaksanakan pelatihan Pemandu Usaha di UPBJJ, perlu diiringi dengan pedoman pelaksanaan yang jelas, sehingga penilaian yang dilakukan terhadap mahasiswa tidak pincang, disamping itu juga mempermudah pelaksanaan di setiap UPBJJ.
- c. Bila praktek/pelatihan dalam membuat proposal dihilangkan, dan mungkin ini adalah hal yang lebih baik, sebab dapat digantikan dengan tugas khusus, seperti misalnya tugas mandiri tetapi menyangkut kewirausahaan terutama usaha-usaha apa yang mungkin dikembangkan oleh mahasiswa, dengan sedikit latar belakang dan kemungkinan pengembangannya, meliputi marketing, masalah keuangan dan peluang usaha. Isi tugas mandiri ini adalah ide atau pengalaman pribadi dari mahasiswa yang ingin berwirausaha, yang dibuat sedemikian rupa dalam bentuk pertanyaan dan uraian sehingga dengan demikian akan terlihat kemampuan mahasiswa dalam menyusun suatu rencana

berwirausaha. Hasil dari tugas mandiri ini dikirim kembali ke Universitas terbuka untuk dievaluasi dan dan dinilai.

Konsekuensi yang harus dihadapi oleh Universitas terbuka adalah "sertifikat" yang diberikan kepada mahasiswa dapat menjadi bumerang, sebab fungsi atau kegunaan sertifikat bagi mahasiswa bukan hanya menyatakan bahwa mahasiswa tersebut sudah dinilai peningkatan kemampuannya, akan tetapi juga dapat merupakan "perantara" bagi mahasiswa dan instansi yang diperlukan atau memerlukan untuk dapat menaikan usaha yang akan dikelolanya kelak.

Dalam hal ini Sertifikat yang diberikan kepada mahasiswa oleh UT terlihat belum mempunyai arti yang dapat digunaka mahasiswa dalam berusaha secara sesungguhnya.

- 1.2. Menghapus sama sekali keterlibatan KADIN Indonesia, atau bila dimungkinkan menggalang kerja sama yang lebih teliti dengan anggota KADIN Indonesia yang memang benar-benar berminat dalam bidang kewirausahaan.

Bila bekerja sama dengan salah satu atau beberapa anggota KADIN Indonesia tentunya petunjuk atau aturan mainnya harus benar-benar jelas, bagaimana pelaksanaan dalam permagangan yang dilakukan oleh mahasiswa, bagaimana prosedurnya dan untuk berapa lama serta hasil apa yang diharapkan akan dapat dicapai juga bagaimana cara menge-

valuasinya sehingga diperoleh nilai sebagai hasil dari suatu prestasi yang telah dicapai oleh mahasiswa dalam praktek permagangan.

Sebenarnya bila praktek permagangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas perusahaan yang ada di bawah KADIN Indonesia, tentu mempunyai dampak positif yang lumayan besar. Sebagai contoh mahasiswa dapat lebih mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya, mahasiswa juga lebih mengetahui bagaimana cara mengelola suatu usaha dengan lebih baik dari hasil magang tersebut, meskipun dilakukan hanya dalam jangka waktu yang pendek. Dari kerja sama ini dapat juga dilanjutkan dengan keterkaitan usaha antara lain bila mahasiswa sudah mulai menjalankan bisnis usahanya dapat dilakukan kerjasama dengan perusahaan yang lebih besar dimana dia magang, misalnya dengan pola bapak asuh dan lain-lainnya.

Bila kerjasama dengan KADIN Indonesia sama sekali ditiadakan, berarti hanya tinggal meneruskan apa yang selama ini sudah berjalan, dengan konsekuensi sertifikat Kewirausahaan ini tidak begitu banyak artinya dalam membantu mahasiswa membuka ataupun mencari peluang usaha. Dengan demikian apalah artinya sebuah sertifikat yang diperoleh dengan membuang biaya yang cukup besar apabila setelah diperoleh ternyata tidak banyak membantu dalam mencari dan atau mengusahakan peluang kerja yang dapat

dijadikan penopang kehidupan si mahasiswa setelah mereka lulus.

2. Menghapus program sertifikat ini untuk tidak merugikan baik UT maupun mahasiswa yang karena jumlah yang sedikit juga karena ketidakpastian/ketidakjelasan dalam penyelenggaraan panduan praktik dari Depnaker.

Cara menghapuskan program ini dilaksanakan secara perlahan yaitu dengan mengarahkan mahasiswa untuk mengalih kreditkan nilai yang diperolehnya ke dalam program S1 (misalnya Administrasi Niaga), sehingga nilai yang sudah dicapai mahasiswa tidak sia-sia. Dengan demikian mahasiswa akan berpikir untuk mengambil program studi yang ditawarkan di FISIP, tidak lagi memilih program sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang sertifikatnya masih diragukan kegunaannya. praktikum yang

3. Alternatif lain adalah merangkum matakuliah yang ditawarkan dalam program Sertifikat atau kita olah kembali menjadi sebuah modul tentang Kewirausahaan yang memungkinkan untuk ditawarkan sebagai matakuliah pilihan pada program studi lain yang ada di Universitas Terbuka, sehingga mahasiswa S1 UT dapat dibekali jiwa wirausaha setelah lulus.

Hal ini dapat diharapkan sebagai suatu umpan dalam berusaha, meskipun kebanyakan mahasiswa UT sudah bekerja tetapi apa salahnya bila jiwa wirausaha itu ditumbuhkan sehingga dapat

digunakan untuk memperbaiki usaha atau kerja yang selama ini sudah biasa dihadapi, bahkan lebih baik lagi bila dapat digunakan sebagai pengembangan diri dalam membuka peluang kerja yang lain.

Tabel 2.

Mata kuliah yang ditawarkan dalam program Sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut

KODE MK	NAMA MK	SKS
WIRA 017	KEWIRAUSAHAAN DAN PANDUAN	3
WIRA 017	MOTIVASI WIRAUSAHA	2
WIRA 017	MANAJEMEN USAHA TERAPAN	3
WIRA 017	KEJURUAN LAPANGAN KERJA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA SERI I	3
WIRA 017	KEJURUAN LAPANGAN KERJA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA SERI II	3
WIRA 017	PROPOSAL USAHA	2

Bila dilihat dari matakuliah yang ditawarkan untuk matakuliah Kejuruan Lapangan Kerja dan Teknologi Tepat Guna baik seri I maupun seri II walaupun menunjukkan peluang-peluang usaha yang dapat dilakukan tetapi buku tersebut harus ditinjau kembali bila dilihat dari pengetikannya, sebab kesalahan ketik banyak sekali terjadi dan dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami isi materi matakuliah tersebut. Pemberian ralat juga dapat dilakukan asalkan dengan bentuk yang baik sehingga tidak mudah hilang.



## KESIMPULAN

Secara keseluruhan program sertifikat Kewirausahaan memang harus ditinjau kembali keberadaannya, sebab program ini hanya menyerap sedikit sekali peserta, sehingga biaya untuk melaksanakan penyelenggaraan program yang dilakukan dengan cara belajar jarak jauh sudah tidak menguntungkan lagi.

Yang harus segera dilaksanakan adalah mengantisipasi keadaan yang tidak menguntungkan ini menjadi sebaliknya.

Alternatif kegiatan perbaikan yang harus segera dijalankan adalah

1. Mengevaluasi kembali program sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan.

Evaluasi ini meliputi:

- a. Kerja sama antar instansi, untuk mengetahui apakah masih perlu dipertahankan pola yang sekarang dilaksanakan atau menghilangkan sama sekali pola yang sekarang dilakukan dengan pola baru yang pelaksanaannya lebih jelas dan terpadu. Dengan keterpaduan pelaksanaan baik di pusat maupun di daerah maka program sertifikat ini diharapkan dapat lebih meningkatkan jumlah mahasiswa yang mendaftar, sebab dari informasi yang diperoleh sebenarnya masih banyak yang berminat pada program ini, akan tetapi begitu mendengar bahwa kerja sama di daerah dimana calon mahasiswa berminat ingin mendaftar ternyata tidak dijalankan secara semestinya ba-

nyak yang langsung mengundurkan diri.

Disamping itu informasi yang jelas tentang penyelenggaraan program sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan juga harus benar-benar sampai ke UPBJJ. Hal ini untuk menghindari keraguan UPBJJ dalam melaksanakan penyelenggaraan di daerahnya. Selama ini yang pelaksanaannya lancar hanyalah di Jakarta (hal ini dimungkinkan karena komunikasi ke UT pusat berjalan mudah dan lancar) dan di Dili (Kanwil Depnaker di sana sangat mendukung).

- b. Kegunaan Sertifikat bagi mahasiswa setelah mahasiswa tersebut lulus.

Sertifikat di sini menggambarkan keterampilan yang diperoleh setelah mengikuti program selama satu semester.

Dengan tiadanya praktik yang diselenggarakan oleh Depnaker, keterampilan yang diharapkan dapat untuk lebih mengenal usaha mandiri kurang begitu mengena lagi, sebab hanya teori saja yang akan diperoleh mahasiswa. Hal ini juga tidak sesuai lagi dengan sistem SISLATERNAS yang digunakan, yaitu lebih menekankan pada praktik dibandingkan teori. Sebagai akibatnya adalah sertifikat yang diperoleh tidak mampu menunjukkan kegunaannya baik bila digunakan untuk menjalin kerjasama dengan orang lain maupun untuk usaha sendiri.

2. Menghilangkan secara perlahan penyelenggaraan program sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan.

Untuk menghilangkan program yang sudah ditawarkan memang tidak mudah. Akan tetapi bila dilakukan secara bertahap, yaitu dengan cara memasukan sks yang sudah diambil ke salah satu program studi (misal Administrasi Niaga) yang ada di FISIP dan kemudian mahasiswa diarahkan untuk mengambil S1, maka secara perlahan program ini dapat dihilangkan.

Mengenai modul yang masih tersisa yang diperkirakan berjumlah kurang lebih 750 set, jalan keluar yang dapat dijadikan alternatif adalah dengan menjual di koperasi ataupun ditoko-toko buku yang biasanya menjual modul-modul dari UT. Sebab dari beberapa informasi yang masuk ke UT, ternyata ada yang hanya ingin membeli modulnya saja tanpa ingin mengikuti program yang ditawarkan. Untuk mengantisipasi hal ini, yang tadinya modul dijual per set, sekarang sudah dapat dibeli satuan.

#### SARAN-SARAN

Dari pengamatan dan dalam mengelola program sertifikat Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, saran yang dapat disampaikan adalah

- a. Untuk menyelenggarakan program pendidikan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan instansi lain, diperlukan petunjuk pelaksana-

naan yang betul betul rinci dan jelas, terutama mengenai tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh UPBJJ, UT maupun instansi lain sebagai mitra kerja.

- b. Untuk memasarkan program baru, perlu diperhatikan peluang pasar, dapat juga diusahakan dengan kerja sama antara dua instansi, yaitu UT sebagai penyelenggara program dan instansi lain sebagai pemakai program, hal ini dapat mengurangi resiko kurangnya peminat terhadap program yang ditawarkan.

**UNIVERSITAS TERBUKA**

## DAFTAR PUSTAKA

1. Alex Rumondor.  
"Program Sertifikat Wirausaha Mandiri Terarah (Self-Employment Entrepreneurship Development": Pengkajian Kelayakan Pendidikan Program Sertifikat Profesi, Industri dan Niaga, 1989.
2. Calvin A. Kent, Donald L. Sexton, Karl H. Vesper.  
Encyclopedia of Entrepreneurship, Prentice Hall, 1982.
3. Donal F. Kuratko, Richard M. Hodgetts.  
Entrepreneurship A Contemporary Approach, The Dreyden Press, 1989.
4. Geoffrey G. Meredith et al  
"Seri Manajemen No.97": Kewirausahaan, Teori dan Praktek. PT. Perca Jkt, 1989.
5. \_\_\_\_\_,  
Kumpulan Makalah Seminar Nasional Kewirausahaan, Himpunan Mahasiswa Mesin dan Jurusan Mesin ITB, 1991.
6. Dr. Demar Hamalik.  
Pendidikan Tenaga Kerja Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
7. Dr. Payaman J. Simanjuntak  
Masalah Ketenagaan di Indonesia, disusun dalam rangka 50 tahun Drs. Cosmas Batubara, Depnaker, 1988.
8. Rolf P. Lynton; Udai Pareek.  
"Seri manajemen No.101": Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja, PT. Pustaka Binaman Pressina, 1984.
9. \_\_\_\_\_,  
Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewiraswastaan di indonesia, Panitia Penyelenggara Lokakarya Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewiraswastaan di Indonesia, 1976.
10. \_\_\_\_\_,  
Berita Pasar Kerja , Triwulan II/19889/1990, Departemen Tenaga Kerja.